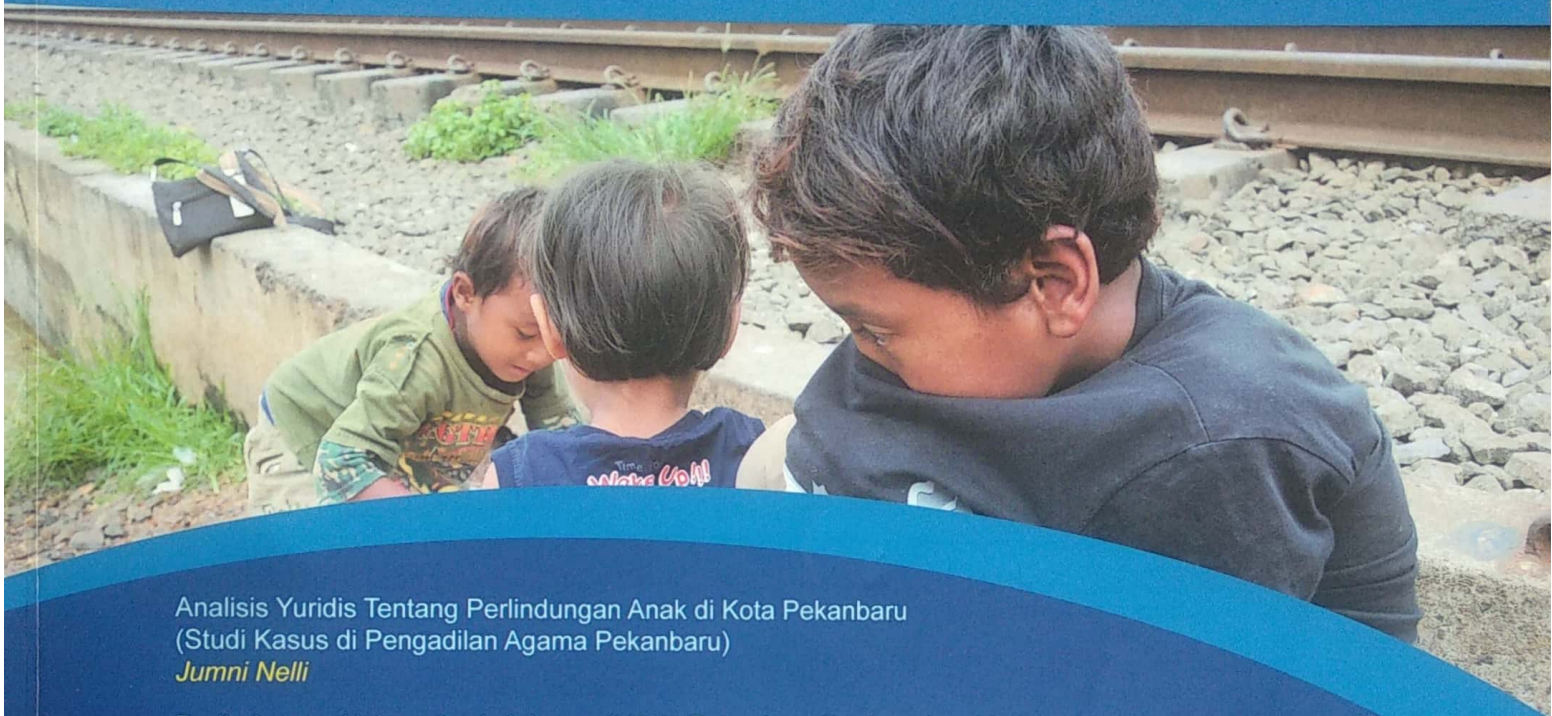


Jurnal Hukum dan HAM

JURNAL MENEGAKKAN KEBENARAN & KEADILAN



Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Anak di Kota Pekanbaru
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Pekanbaru)

Jumni Nelli

Perlindungan Hukum Anak Jalanan di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Febri Handayani

Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Narapidana Wanita dalam Sistem Per masyarakatan
(Kajian Pada Lembaga Pemasyarakatan Anak dan Wanita Klas IIB Pekanbaru)

Lysa Angrayni dan Nur'aini Sahu

Sanksi Bagi Pelaku Perusakan Lingkungan (Studi Pelanggaran Hukum Lingkungan di Propinsi Riau)

Mahmuzar dan Mustiqowati Ummul Fithriyyah

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung dalam Memperkokoh Sistem
Pemerintahan Presidensial di Indonesia

Ardiansyah

Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia di Indonesia

Asril

Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CRS) dalam Pengembangan Masyarakat Lokal
(Studi Pada PT. Chevron Pacific Indonesia Duri)

Yusliati dan Muhammad Suryani

Dampak Pemekaran Otonomi Daerah Terhadap Pelayanan Publik (Studi Perbandingan Antara
Kabupaten Indragiri Hulu Dan Kab. Kuantan Singingi)

Afrinaldy Rustam



Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Jurnal Hukum dan HAM

JURNAL MENEGAKKAN KEBENARAN & KEADILAN

Penanggung Jawab
Husni Thamrin

Redaktur
Abu Bakar

Redaktur Pelaksana
H. Eрман
M. Suryani
Budi Hazmor

Penyunting Ahli
H. Amir Lutfi, Syafrinaldi, Elidar Khairdir, Alaidin Koto, Hajar M, Firdaus

Tata Usaha
Suzhisni Ade Permana Putra
Rika Rahmayuni

Alamat Redaksi:
Gedung Islamic Center UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Jl. H.R. Soebrantas K.M. 15.5 Pekanbaru Riau 28292
Telp. +62-761-1234567
Portal Jurnal: jurnal-lppm.uin-suska.ac.id
Web: lppm.uin-suska.ac.id
E-mail: lp2muinsuska@yahoo.com

Jurnal Hukum & HAM adalah Jurnal Menegakkan Kebenaran & Keadilan yang terbit dua kali setahun. Redaksi menerima tulisan mengenai pemikiran Islam, baik berupa artikel, maupun tinjauan buku. Panjang tulisan antara 20-25 halaman kuarto 1,5 spasi, diserahkan dalam bentuk print out dan file dalam Microsoft Word. Tulisan dapat dikirimkan melalui e-mail. Penulis harap menyertakan abstrak dalam bahasa Indonesia dan Inggris, biodata singkat dalam bentuk esai, dan alamat lengkap. Redaksi berhak menyunting naskah tanpa mengurangi maksud tulisan. Bagi lembaga yang ingin mendapatkan jurnal ini, dapat menghubungi alamat di atas.

DAFTAR ISI

Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Anak di Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pekanbaru)	
<i>Jummi Nelli</i>	1
Perlindungan Hukum Anak Jalanan di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	
<i>Febri Handayani</i>	9
Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Narapidana Wanita dalam Sistem Permasalahan (Kajian Pada Lembaga Pemasyarakatan Anak dan Wanita Klas IIB Pekanbaru)	
<i>Lysa Angrayni dan Nur'aini Sahu</i>	22
Sanksi Bagi Pelaku Perusakan Lingkungan (Studi Pelanggaran Hukum Lingkungan di Propinsi Riau)	
<i>Mahmuzar dan Mustiqowati Ummul Fithriyyah</i>	34
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung dalam Memperkokoh Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia	
<i>Ardiansyah</i>	42
Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia di Indonesia	
<i>Asril</i>	57
Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CRS) dalam Pengembangan Masyarakat Lokal (Studi Pada PT. Chevron Pacific Indonesia Duri)	
<i>Yusliati dan Muhammad Suryani</i>	63
Dampak Pemekaran Otonomi Daerah Terhadap Pelayanan Publik (Studi Perbandingan Antara Kabupaten Indragiri Hulu Dan Kab. Kuantan Singingi)	
<i>Afrinaldy Rustam</i>	78

Sanksi Bagi Pelaku Perusakan Lingkungan (Studi Pelanggaran Hukum Lingkungan di Propinsi Riau)

Oleh: Mahmuzar¹ dan Mustiqowati Ummul Fithriyyah²

Abstrak

Sanksi bagi pelaku kerusakan lingkungan hidup sudah diatur dengan tegas di dalam UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, baik berupa sanksi administrasi, sanksi perdata maupun sanksi pidana. Namun, sampai saat ini laju kerusakan lingkungan hidup di Indonesia, termasuk di daerah Propinsi Riau terus berlanjut, belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir seperti pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, pembabatan hutan tropis dan lain-lain. Para pelakunya pada umumnya adalah badan/kegiatan usaha. Sebagian kecil dari mereka telah dijatuhi sanksi administrasi, baik kategori ringan, sedang maupun berat. Namun, hingga saat ini tidak ada satupun penanggungjawab badan/kegiatan usaha yang dijatuhi sanksi perdata apalagi pidana.

Kata Kunci: Hukum, Lingkungan Hidup, Sanksi

Pendahuluan

Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memuat tiga macam sanksi bagi pelaku kerusakan lingkungan hidup yakni; sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. Namun, hingga saat ini laju kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin hari semakin parah, bahkan volumenya selalu mengalami peningkatan, termasuk di daerah Propinsi Riau, sehingga mendatangkan berbagai macam bencana dan malapetaka bagi umat manusia beberapa dekade terakhir ini seperti banjir, tanah longsor, kemarau berkepanjangan, naiknya permukaan air laut yang mengancam kota-kota pesisir pantai, pemanasan global, musim yang tak beraturan dan lain sebagainya.

Pengrusakan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup ini, dilakukan oleh banyak pihak, baik orang per-orang, perusahaan (berbadan hukum privat dan publik), termasuk oleh institusi negara sendiri yang semestinya bertugas melestarikan lingkungan yang sehat dan asri bagi rakyatnya. Banyak alasan yang dapat dikemukakan, mengapa kerusakan lingkungan hidup di berbagai negara, termasuk di Indonesia volumenya selalu mengalami peningkatan. Namun, faktor paling utama adalah faktor pembangunan ekonomi negara yang pada umumnya cenderung menganut sistem ekonomi kapitalis dengan prinsip maksimalisasi keuntungan (*profit maximization*).

Doktrin ekonomi kapitalis memandang lingkungan atau alam ini sebagai sarana produksi yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Prinsip tersebut sejalan dengan pandangan Malthus (1766-1834) yang mengatakan bahwa; jumlah penduduk dunia cenderung bertambah, melebihi pertumbuhan produksi (barang dan jasa). Oleh karena itu, pengurangan ledakan penduduk merupakan suatu keharusan, dan ini hanya dapat dicapai melalui bencana kerusakan lingkungan hidup, kelaparan, perang atau pembatasan kelahiran. Sejalan dengan itu, untuk memperbanyak jumlah barang dan jasa maka dilakukan eksploitasi secara besar-besaran terhadap sumber daya alam, tidak peduli merusak lingkungan hidup. Padahal sering dijumpai, kerusakan lingkungan hidup dengan alasan pembangunan (ekonomi) membawa dampak negatif lebih besar atau mendatangkan kerugian lebih banyak dari pada keuntungan yang didapat oleh negara dan masyarakat.

Sistem ekonomi kapitalis yang menganut prinsip maksimalisasi keuntungan (*profit maximization*) di atas, juga di anut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam rangka meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D). Melalui instrumen hukum berupa peraturan perundang-undangan, pemerintah membuka Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) dan/atau memberikan izin secara serampangan kepada berbagai macam perusahaan/badan usaha untuk melakukan kegiatan usaha guna mengeksploitasi sumber daya alam (SDA) yang ada di negara ini,

yang kadang kala tidak memikirkan efek negatif berupa rusaknya lingkungan hidup.³ Padahal di sisi lain, tindakan perusakan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak azasi manusia (HAM) karena menurut konsepsi HAM generasi ketiga, lingkungan hidup yang sehat dan seimbang merupakan hak azasi setiap manusia.⁴ Hal itu dapat dilihat pada azas (*Principle*) I Konfrensi Lingkungan Hidup Manusia (*Conference on the Human Environment*) 1972 di Stockholm yang menyatakan; *Man has fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life in an environment of equality and permits a life of dignity and well being, and he bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generation. In this respect, policies promoting or perpetuating apartheid racial segregation, discrimination, colonial and other forms of oppression and foreign domination, stand condemned and must be eliminated.*⁵

Konsep HAM generasi ketiga ini, kemudian dianut oleh banyak negara misalnya Belanda sebagaimana dimuat dalam Pasal 21 *Grondwet* (UUD) Kerajaan Belanda Tahun 1983, Korea Selatan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Konstitusi Republik Korea Tahun 1987⁶ dan juga oleh Republik Indonesia melalui UUD 1945 hasil amandemen dan UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2009. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan; "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan." Selanjutnya Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan; "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia." Oleh karena itu, untuk menjalankan amanat konstitusi dan UU tersebut maka proses kerusakan lingkungan hidup tidak boleh berlanjut dan harus segera diatasi demi kepentingan hak azasi manusia, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Untuk keperluan itu maka pemerintah mengatur pemberian sanksi, baik sanksi administrasi, sanksi perdata maupun sanksi pidana⁷ terhadap pelaku perusakan lingkungan hidup, sebagaimana disebutkan di atas diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2009. Namun,

semenjak UU ini disahkan pada tanggal 19 September 1997 hingga saat ini, sangat jarang bahkan hampir tidak terdengar para pelaku perusak lingkungan hidup mendapatkan sanksi, baik sanksi administratif, perdata maupun pidana dari institusi penegak hukum atau lembaga yang berwenang sehingga laju perusakan lingkungan hidup tetap berlanjut hingga saat ini di Indonesia, termasuk di Propinsi Riau.

Banyak contoh kasus badan/kegiatan usaha yang nyata-nyata melakukan kegiatan merusak/mencemarkan lingkungan hidup seperti yang dilakukan oleh PT. Batam Textil, PT. Dama Textil di Propinsi Kepulauan Riau, PT. Newmont di Nusa Tenggara Barat (NTB)⁸ dan belasan perusahaan besar lainnya di Propinsi Riau yakni; PT. Torganda, PT. Merbau Pelalawan, PT. Kembang Selaras, PT. Madukoro, PT. Citra Sumber Sejahtera, PT. Bukit Betabuh Sei Indah, PT. Nusa Prima Manunggal, PT. Anugerah Bumi Sejahtera, PT. Inhil Hutan Pratama, PT. Ruas Utama Jaya, PT. Arara Abadi, PT. Suntara Gajah Pati, PT. Bina Duta Laksana, PT. Rimba Mandau Lestari, PT. Wana Rokan Bonai Perkasa⁹ dan banyak lagi yang lain-lain.

Perusahaan-perusahaan di atas dalam melakukan kegiatan usahanya di duga telah melakukan perusakan/pencemaran terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Namun, hingga saat ini tidak satupun yang mendapat sanksi dari institusi penegak hukum, baik berupa sanksi administratif, sanksi perdata maupun sanksi pidana. Oleh karena itu, tulisan singkat ini mencoba menguraikan; *pertama*, apakah pengaturan sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana bagi pelaku perusakan lingkungan hidup sudah baik atau sebaliknya belum, sehingga laju kerusakan lingkungan masih tetap berlanjut, termasuk di daerah Propinsi Riau. *Kedua*, bagaimana penerapan sanksi administratif, sanksi perdata maupun sanksi pidana bagi pelaku perusakan lingkungan hidup, khususnya di Propinsi Riau?

Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan ringkasan dari penelitian hukum yang dilakukan pada tahun 2013 dalam rentang waktu bulan Juni hingga September. Penelitian ini, memerlukan data berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data tersebut dikumpulkan melalui studi lapangan dan studi pustaka. Setelah data terkumpul kemudian diklasifikasi, lalu dianalisis

menggunakan metode induktif kualitatif, lalu diambil kesimpulan berdasarkan pemikiran logis.

Sanksi Bagi Pelaku Perusakan Lingkungan

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur sanksi bagi pelaku kerusakan lingkungan yakni sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. *Pertama*, sanksi administrasi. Sanksi administrasi bagi pelaku kerusakan lingkungan ada tiga kategori, yaitu kategori ringan, sedang dan berat. Sanksi administrasi kategori ringan yakni berupa teguran tertulis dari pemerintah berwenang, dapat dikenakan kepada pelaku kerusakan lingkungan apabila;¹⁰ (1), pelaku kerusakan lingkungan baru pertama kali melakukan pelanggaran; (2), pelanggaran tersebut tidak menimbulkan korban jiwa manusia atau akibat yang serius terhadap masyarakat dan lingkungan hidup sekitarnya. Selanjutnya, sanksi administrasi kategori sedang berupa paksaan pemerintah dapat dikenakan kepada pelaku kerusakan lingkungan apabila; (1), surat peringatan tertulis terdahulu tidak diindahkan sebagaimana mestinya oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan usaha; (2), perusahaan atau kegiatan usaha dinilai masih mempunyai kemauan dan kemampuan untuk mengatasi pelanggaran hukum lingkungan yang terjadi; (3), pelanggaran hukum lingkungan belum menimbulkan korban atau akibat yang ditimbulkan masih dapat ditolerir oleh pemerintah dan masyarakat, terutama masyarakat yang terkena dampak pelanggaran; (4), masyarakat tidak menunjukkan sikap bermusuhan dengan pihak perusahaan atau kegiatan usaha.

Kemudian, sanksi administrasi kategori berat berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan dapat dikenakan kepada pelaku kerusakan lingkungan apabila; (1), pelanggaran lingkungan menimbulkan korban atau akibat yang serius terutama terhadap jiwa dan kesehatan manusia atau menimbulkan kerugian materiil yang besar bagi warga masyarakat dan/atau lingkungan hidup; (2), penanggung jawab usaha tidak sungguh-sungguh menanggulangi kerugian yang menimpa masyarakat dan akibat yang ditimbulkannya; (3), perusahaan tidak mempunyai potensi untuk menanggulangi kerugian yang timbul dan memulihkan lingkungan yang tercemar dan/atau rusak; (4), pencemaran dan/atau kerusakan yang timbul bersifat tidak dapat diperbaiki, jika upaya

pemulihan dilakukan maka akan sia-sia; (5), riwayat ketaatan perusahaan sangat buruk; (6), perusahaan sudah tidak produktif atau secara ekonomis sudah tidak menguntungkan lagi.

Kedua,¹¹ pengaturan sanksi perdata bagi pelaku kerusakan/pencemaran lingkungan hidup sudah diatur dengan baik di dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, penjatuhan sanksi perdata kepada badan/kegiatan usaha yang melakukan kerusakan/pencemaran lingkungan hidup baru dapat dilakukan apabila para pihak yang bersengketa mengikuti prosedur penyelesaian sengketa perdata lingkungan, baik melalui proses pengadilan maupun di luar pengadilan. Proses penyelesaian sengketa perdata lingkungan hidup melalui proses pengadilan dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, baik oleh kelompok masyarakat yang merasa dirugikan secara perdata, organisasi lingkungan hidup maupun oleh pemerintah. Sedangkan penyelesaian sengketa perdata lingkungan hidup di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara menunjuk mediator atau arbiter.

Selanjutnya *ketiga*,¹² pengaturan sanksi pidana bagi pelaku kerusakan lingkungan merupakan suatu hal yang baru, termasuk di NKRI, setelah banyak pihak menyadari pentingnya kelestarian fungsi lingkungan hidup bagi kelangsungan hidup manusia. Ancaman sanksi pidana tersebut tersebar di dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan, yang salah satunya yakni UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU tersebut memuat dua macam delik bagi pelaku kerusakan lingkungan yakni delik material dan delik formal yang ancaman hukumannya sudah sangat jelas dan tegas, dapat berupa uang denda atau hukuman badan. Oleh karena itu, yang terpenting saat ini adalah aplikasinya oleh aparat penegak hukum agar UU tersebut tidak menjadi *law in book*, akan tetapi menjadi *law in action*.

Oleh karena itu timbul pertanyaan, bagaimana penerapan sanksi di atas terhadap kasus kerusakan lingkungan, termasuk di Propinsi Riau? Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia (KLH-RI), dari tahun 2009¹³ hingga saat ini, penanganan kasus kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup mengalami peningkatan cukup tajam. Ini artinya, eksploitasi SDA dengan cara merusak lingkungan

hidup dan ekosistem di dalamnya yang nota bene melanggar hukum lingkungan dan peraturan perundang-undangan lainnya, dari tahun 2009 hingga saat ini mengalami peningkatan drastis, dan dapat membahayakan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang.

Sebagai contoh misalnya, di Indonesia dalam triwulan pertama tahun 2013,¹⁴ (dari Januari s/d Maret) terdapat 29 kasus pelanggaran hukum yang berpotensi merusak lingkungan hidup. 29 kasus tersebut penanganannya oleh Kementerian Lingkungan Hidup berada pada level berbeda-beda satu sama lain. Ada yang masih dalam tahap penyelidikan, penyidikan, tahap penuntutan (siap untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan karena sudah mempunyai barang bukti yang cukup atau P21), dan ada pula yang dalam proses persidangan di pengadilan dan bahkan ada yang telah dijatuhi sanksi, baik oleh pemerintah maupun oleh pengadilan. Kasus kerusakan lingkungan hidup yang berada dalam tahap penyidikan atau pengumpulan bukti-bukti oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kementerian Lingkungan Hidup terdapat sebanyak 4 (empat) kasus. Selanjutnya, kasus pelanggaran hukum lingkungan yang berada dalam tahap penyidikan ada 2 (dua) kasus yakni kasus impor limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) yang terjadi di pelabuhan Batam yang melibatkan PT. JOM dan kasus pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau yang melibatkan PT. MAL (kasus pembakaran hutan dan lahan di Propinsi Riau selanjutnya dibahas di bawah). Selanjutnya yang berada pada tahap penuntutan (siap dilakukan penuntutan ke pengadilan karena sudah memiliki cukup bukti (P21) ada 5 (lima) kasus, masing-masing melibatkan PT. SF, PT. RT, CV. RJU, CV. Perfecta, CV. Cisarua. Kemudian, kasus pelanggaran hukum lingkungan yang dalam proses persidangan di pengadilan terdapat 12 (dua belas) kasus, yang melibatkan PT. Dok Koja Bahari 2, PT. Dok Koja Bahari 3, PT. Dok Koja Bahari 4, PT. Wayata Kencana Dockyard, PT. Bayu Bahari Sentosa, PT. Rosikin, PT. Pasific Paint, PT. Karya Teknik Utama, PT. Usaha Ganda Respati, PT. Daya Radar Utama dan PT. Sulung Bungsu Mandiri. Sisanya 7 (tujuh) kasus sudah dijatuhi sanksi, 6 (enam) di antaranya berupa sanksi administrasi yang dijatuhkan oleh pemerintah dan satu lagi diputus oleh pengadilan yakni dalam kasus pembakaran hutan dan lahan di Propinsi Riau.

Kasus kerusakan lingkungan banyak macam ragamnya, di antaranya ada yang berbentuk pencemaran air sungai/danau/laut oleh limbah pabrik dan minyak mentah serta limbah rumah tangga, pencemaran tanah akibat pembuangan limbah industri dan tumpahan minyak mentah serta pemakaian pestisida dan bahan kimia lainnya secara berlebihan, kerusakan atau perambahan hutan dan ekosistem di dalamnya, pencemaran udara akibat pembakaran hutan dan lahan dan lain sebagainya. Namun, dari beberapa kasus tersebut, yang paling menonjol di Indonesia, termasuk di daerah Propinsi Riau adalah kasus pencemaran udara akibat pembakaran hutan dan lahan, baik yang dilakukan oleh orang perorang maupun perusahaan.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan data satelit yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Republik Indonesia menunjukkan bahwa; jumlah titik api terpantau yang menimbulkan pencemaran udara dari tahun ke tahun di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sangat banyak, mencapai puluhan ribu bahkan ratusan ribu titik api dalam setiap tahunnya, termasuk yang terdapat di daerah Propinsi Riau.

Berdasarkan citra satelit BMKG,¹⁵ di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2006 terdapat sebanyak 146.264 (seratus empat puluh enam ribu dua ratus enam puluh empat) titik api, tahun 2007 sebanyak 37.909 (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan) titik api, tahun 2008 sebanyak 30.616 (tiga puluh ribu enam ratus enam belas) titik api, tahun 2009 sebanyak 29.463 (dua puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh tiga) titik api, tahun 2010 sebanyak 9.898 (sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) titik api, dan tahun 2011 sebanyak 22.456 (dua puluh dua ribu empat ratus lima puluh enam) titik api. Sedangkan pada tahun 2012 dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus terdapat sebanyak 5.627 (lima ribu enam ratus dua puluh tujuh) titik api.

Titik api tersebut tersebar di beberapa daerah propinsi di Indonesia. Namun, sebaran titik api tersebut hampir sama setiap tahunnya yakni terjadi di daerah Propinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Ini artinya, kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, termasuk di daerah Propinsi Riau intensitasnya dari

tahun ke tahun sangat tinggi, termasuk tahun 2013 sekarang ini.

Jumlah titik api yang menyebabkan pencemaran udara di Propinsi Riau dan daerah-daerah sekitarnya pada tahun 2013 mencapai sebanyak 974 (sembilan ratus tujuh puluh empat) titik api¹⁶, tersebar di semua daerah kabupaten/kota yang ada di daerah Propinsi Riau. Namun, yang paling banyak terdapat di daerah Kabupaten Bengkalis yakni mencapai 471 (empat ratus tujuh puluh satu) titik api, kemudian disusul oleh Kabupaten Rokan Hilir pada urutan kedua sebanyak 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) titik api dan Kabupaten Rokan Hulu pada urutan ketiga sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) titik api.

Kasus kebakaran hutan dan lahan di daerah Propinsi Riau terus terjadi, mulai dari tahun 1997 hingga sekarang, yang kemudian ternyata diketahui sebagian besar di antaranya berada pada area konsesi perusahaan perkebunan dan wilayah yang diperuntukkan bagi aktivitas perkebunan. Khusus pada tahun 2013 ini, jumlah titik api yang terdapat pada kawasan Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pada areal HTI PT. APP Grup dan PT. APRIL Grup, jumlahnya mencapai sebanyak 2.031 titik api. Akibatnya, udara di Propinsi Riau dan daerah sekitarnya menjadi tercemar dan membahayakan kesehatan masyarakat.

Menurut Tengku Zul Efendi, Kepala Bidang Pengendalian Penyakit Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Riau, pencemaran udara di Propinsi Riau dan sekitarnya (waktu kebakaran hutan dan lahan) menunjukkan angka tidak sehat, indeks polusinya mencapai 350 poin, bahkan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau mengumumkan Indeks Standar Pencemaran Udara di Propinsi Riau dan sekitarnya sudah mencapai 400 poin. Angka ini masuk dalam kategori hitam, sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat.¹⁷ Buktinya banyak masyarakat Propinsi Riau yang terjangkit penyakit saluran pernapasan atau ISPA. Menurut Dewani, Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Riau,¹⁸ Jumlah masyarakat yang terjangkit penyakit ISPA di Propinsi Riau akibat peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang mencemarkan udara mencapai sebanyak 19.862 (sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh dua) orang, terdiri dari 8.123 (delapan ribu seratus dua puluh tiga) anak-anak di bawah umur 4 tahun dan sisanya sebanyak 11.739 (sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) orang adalah warga

Riau berumur 5 tahun ke atas. Penderita terbanyak terdapat di daerah Kabupaten Rokan Hilir, tempat titik api terbanyak nomor dua yakni mencapai 2.290 (dua ribu dua ratus sembilan puluh) orang penderita.

Selain merugikan kesehatan masyarakat, dampak pencemaran udara tidak hanya terjadi di Propinsi Riau, akan tetapi juga di negara tetangga, hampir seluruh wilayah ASEAN tertutup kabut asap sehingga pemerintah Indonesia mendapat kecaman serius dari negara-negara tetangga Malaysia dan Singapura. Di samping itu, peristiwa kebakaran hutan dan lahan juga mendatangkan kerugian sangat besar bagi negara. Misalnya pada tahun 2001 s/d 2006, akibat peristiwa kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera, negara rugi sebanyak US \$ 7,8 milyar dan di wilayah Kalimantan kerugian negara mencapai US \$ 5,8 milyar, yang kalau dirupiahkan 1\$ US = Rp 10.000 maka kerugian negara mencapai Rp 13,6 Trilyun. Kerugian negara tersebut belum termasuk anggaran rutin yang selalu dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional dan Daerah (BPBN/D) untuk menanggulangi peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang selalu terjadi setiap tahunnya.¹⁹

Selain kasus pencemaran udara akibat pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau dari tahun 2009 s/d 2013 terdapat sebanyak 23 kasus pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh berbagai macam perusahaan yang terdapat di daerah Propinsi Riau yang diadukan oleh masyarakat²⁰, LSM dan pemerintah daerah ke Badan Lingkungan Hidup (BLH) Propinsi Riau, termasuk limpaan kasus dari Kepolisian Daerah (Polda) Propinsi Riau.

Dari 23 kasus dugaan pelanggaran lingkungan yang dilakukan berbagai macam perusahaan di Riau sebagian di antaranya, yakni pengaduan pada tahun 2011 dan 2012 telah ditindaklanjuti oleh BLH Propinsi Riau. Untuk tahun 2011 terdapat lima kasus pengaduan kerusakan lingkungan dari masyarakat yang diduga dilakukan oleh PT. Pertamina dan PT. Pelindo, PT. Mutiara Unggul, PT. Bina Sawit Nusantara, PT. RAPP dan PT. Meskom. Berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh BLH Propinsi Riau ke 5 perusahaan tersebut, 2 perusahaan yakni PT. Bina Sawit Nusantara dan PT. RAPP terbukti melakukan kerusakan/pencemaran lingkungan sebagaimana diadukan oleh masyarakat. PT. Bina Sawit Nusantara, berdasarkan uji lab yang dilakukan oleh BLH Propinsi Riau, terbukti melakukan pencemaran lingkungan karena limbah Pabrik Kelapa Sawit perusahaan ini ada

beberapa para meter di atas ambang batas maksimal lingkungan (BML). Karena PT. Bina Sawit Nusantara terbukti melakukan pencemaran lingkungan maka perusahaan tersebut kemudian dikenakan sanksi administrasi kategori ringan oleh pejabat pengawas BLH Kabupaten Kampar dan BLH Propinsi Riau yakni berupa teguran tertulis agar ketentuan perizinan lingkungan ditaati sebagaimana diberikan. Agar peringatan tertulis tersebut benar-benar diindahkan oleh PT. Bina Sawit Nusantara sehingga pencemaran lingkungan tidak lagi berlanjut dan terulang kembali maka BLH Kabupaten Kampar dan BLH Propinsi Riau melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala terhadap aktivitas perusahaan yang bersangkutan.²¹

Selanjutnya, PT. RAPP yang diadukan oleh masyarakat atas nama Kelompok Serikat Tani Riau ke Kementerian Lingkungan Hidup yang juga ditembuskan ke BLH Propinsi Riau, di duga melakukan kerusakan lingkungan di Pulau Padang Kabupaten Meranti seluas 41.000 Hektar. Setelah Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, BLH Propinsi Riau dan Kementerian Kehutanan melakukan verifikasi ke lapangan, akhirnya Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup yang memberikan izin lingkungan kepada PT. RAPP menghentikan sementara kegiatan PT. RAPP di Pulau Padang. Penghentian sementara ini berdasarkan jenis sanksi administrasi di atas sama dengan pembekuan izin. Pembekuan izin ini kemudian bisa dicabut kembali oleh pejabat atau pemerintah yang berwenang apabila perusahaan yang bersangkutan telah menyelesaikan persolan lingkungan yang membelitnya.

Kemudian, pengaduan masyarakat pada tahun 2012 yang ditindak-lanjuti oleh BLH Provinsi berjumlah sebanyak 8 kasus dugaan kerusakan lingkungan yang melibatkan PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI), PT. Pelindo, PT. Ivomas Tunggal, PT. Sarana Agro Nusantara, PT. Nagamas Palm Oil Lestari, PT. Fortius Agro Asia, PT. Padasa Enam Utama Kalianta I, PT. Panca Agro Lestari, PTPN V dan PT. Wahanakarsa Swandiri Sub Kontraktor PT. CPI. Semua pengaduan masyarakat tersebut sudah ditindak-lanjuti oleh BLH Propinsi Riau, dan berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh BLH Propinsi Riau, terbukti 2 perusahaan yakni PT. Panca Agro Lestari dan PT. Wahanakarsa Swandiri Sub Kontraktor PT. CPI melakukan pelanggaran izin lingkungan yang

diberikan pemerintah. PT. Panca Agro Lestari yang berlokasi di Kabupaten Indragiri Hulu melakukan perambahan hutan, kemudian menanaminya dengan kelapa sawit dengan cara melanggar izin lingkungan. Karena PT. Panca Agro Lestari melakukan perluasan lahan perkebunan kelapa sawit dengan cara merambah hutan, tidak sesuai dengan izin lingkungan yang diberikan pemerintah maka pemerintah memberikan sanksi administrasi kepada PT. Panca Agro Lestari berupa teguran tertulis yang mewajibkan atau memerintahkan kepada PT. Panca Agro Lestari untuk melakukan revisi dokumen lingkungan karena luas lahan perkebunan yang dikuasai tidak sesuai lagi dengan dokumen izin lingkungan yang diberikan pemerintah. Menurut penulis, sanksi administrasi yang diberikan oleh pemerintah kepada PT. Panca Agro Lestari tersebut sangat ringan, tak sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukannya. Mestinya pemerintah menggunakan undang-undang kehutanan dan undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk menjerat PT. Panca Agro Lestari yang telah melakukan perluasan lahan perkebunan dengan cara merambah hutan dan merusak ekosistem di dalamnya.

Selanjutnya, PT. Wahanakarsa Swandiri Sub Kontraktor PT. CPI, akibat kegiatan operasionalnya terbukti melakukan pencemaran lingkungan yakni air Sungai Pangambang yang terdapat di KM 15 Jalan Rangau, Desa Petani, Kabupaten Bengkalis. Karena perbuatannya tersebut, pemerintah menjatuhkan sanksi administrasi kategori sedang kepada PT. Wahanakarsa Swandiri dan PT. CPI berupa upaya paksa yakni harus membangun sumur bor bagi masyarakat Desa Petani Kabupaten Bengkalis karena mereka tak dapat lagi menggunakan dan mengkonsumsi air Sungai Pangambang untuk keperluan sehari-hari. Di samping itu, PT. Wahanakarsa Swandiri dan PT. CPI diwajibkan melakukan pembersihan Sungai Pangambang, khususnya di KM 15 Jalan Rangau, Desa Petani, Kabupaten Bengkalis yang beayanya ditanggung sendiri oleh pihak perusahaan sampai air sungai tersebut layak, dan tidak membahayakan jika digunakan kembali oleh masyarakat.²²

Dari ketiga jenis sanksi bagi pelaku kerusakan lingkungan, hanya sanksi administrasi yang diterapkan dalam kasus pelanggaran hukum lingkungan di Provinsi Riau, sedangkan sanksi perdata dan sanksi pidana belum terwujud. Artinya, hingga saat ini belum ada satupun putusan pengadilan tentang hal

ini disebabkan karena sanksi pidana baru dapat diterapkan apabila instrument sanksi administrasi dan perdata tidak efektif untuk menanggulangi masalah perusakan lingkungan.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa; pengaturan sanksi administrasi, sanksi perdata maupun sanksi pidana bagi pelaku perusakan lingkungan hidup di Propinsi Riau belum terlaksana dengan baik, sehingga laju kerusakan lingkungan masih tetap berlanjut hingga saat ini. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pelaku perusakan lingkungan di daerah Propinsi Riau dilakukan oleh banyak pihak, baik oleh orang-orang pribadi maupun korporasi/kegiatan usaha, namun yang terbanyak dilakukan oleh badan/kegiatan usaha. Sebagian mereka hanya diberi sanksi administrasi, baik kategori ringan berupa peringatan tertulis, kategori sedang berupa upaya paksa maupun kategori berat yakni berupa penangguhan, dan tidak satupun hingga saat ini pelakunya dijatuhi sanksi perdata apalagi pidana.

Catatan: (Footnotes)

1. Mahmuzar, M.Hum, Dosen Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
2. Mustiqowati Ummul Fithriyyah, M.Si, Dosen Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, UIN Suska Riau.
3. Contoh terbaru adalah pemberian izin kepada 6 perusahaan tambang yaitu PT. Weda Bay, PT. Nusa Halmahera, PT. Gag Nikel, PT. Galuh Cempaka, PT. Jorong Barutama Greston dan PT. Barisan Tropikal Mining untuk mengeksploitasi bahan tambang di areal hutan lindung, padahal UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan secara tegas melarang kegiatan pertambangan secara terbuka di areal hutan lindung. Untuk lebih lengkapnya pembahasan tentang masalah ini lihat Djoko Marsono, (2003), *Pertambangan di Hutan Lindung*, Kedaulatan Rakyat Edisi Rabu 10 September 2003, hal. 10. A. Sonny Keraf, (2003), *Kontroversi Pertambangan di Hutan Lindung*, Kompas Edisi Minggu 13 Juli 2003, hal. 31. Lihat juga liputan Fokus Kompas Edisi yang sama dari hal. 25-32 dan Media Indonesia Edisi 15 Maret 2003.
4. Konsep HAM generasi ketiga merupakan gabungan konsep HAM generasi pertama dengan konsep HAM generasi kedua. HAM generasi ketiga bersifat kolektif, meliputi hak atas penentuan nasib sendiri di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya; hak atas pembangunan ekonomi dan sosial, serta hak untuk berpartisipasi dan memanfaatkan warisan bersama umat manusia (sumber daya bumi, ruang angkasa, informasi dan kemajuan ilmiah, teknologi dan lain-lain); hak atas perdamaian, lingkungan hidup yang sehat dan seimbang, dan hak atas bantuan bencana alam yang bersifat kemanusiaan. Burn H. Weston, (1993), *Hak Asasi Manusia dalam T. Mulya Lubis (ed), Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia: Isu dan Tindakan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hal. 13.
5. Andi Hamzah, (2005), *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, hlm., 95-95.
6. *Ibid*, hlm., 96.
7. Menurut Muladi, pemberian sanksi pidana terhadap pelanggaran hukum lingkungan hendaknya diberikan apabila pemberian sanksi administrasi dan sanksi perdata tidak tepat dan tidak efektif untuk menangani tindak pidana lingkungan tertentu. *Panduan dan Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Lingkungan Propinsi Sumatra Utara*, (2002), Kerjasama Bapedalda Propinsi Sumatra Utara dengan Lembaga Penelitian Universitas Sumatra Utara (USU), Medan, hal. 87.
8. <http://www.proper.menlh.go.id>, diakses tanggal 1 Januari 2013.
9. <http://www.jikalahari.com>, diakses tanggal 2 Januari 2013.
10. Ketiga macam sanksi tersebut diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yang kemudian diatur lebih lanjut melalui PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
11. *ibid*
12. *Ibid*
13. <http://www.new.menlh.go.id>, Kasus Lingkungan Meningkat, KNLH Intensifikasi Penegakan Hukum, diakses Kamis, 11 Juli 2013.
14. *Ibid*
15. Laporan Tindak Pidana 117 Perusahaan, yang disampaikan Eksekutif Nasional WALHI, WALHI Riau, WALHI Jambi, WALHI Sum-Sel, Sawit Watch, Elsam, YLBHI, ICEL, SPKS, pada 23 Juni 2013, pada mongabay.co.id, diakses pada 21 Juli 2013.
16. <http://www.mongabay.co.id>, Jumlah Titik Api di Riau, WALHI Riau 2013
17. *Ibid*.
18. <http://www/tempo.com>, diakses 26 Juni 2013.
19. Misalnya, pada tahun 2006 BPBN menganggarkan dana sebanyak Rp 26 Milyar untuk menanggulangi kasus kebakaran hutan dan lahan. Dan untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Propinsi Riau pada tahun 2013 BPBN menghabiskan anggaran sebanyak 42 Milyar lebih.

20. Data diperoleh berdasarkan wawancara kepada pegawai BLH/Bapedalda Riau dan berdasarkan dokumen yang telah diarsipkan oleh BLH/Bapedalda Riau

21. *Ibid*

22. *Ibid*

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, (2005), *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Pertama.
- A Sonnnny Keraf, (2003), *Kontroversi Pertambangan di Hutan Lindung*, Kompas Edisi Minggu 13 Juli 2003.
- Bapedalda Sumatera Utara, *Panduan dan Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Lingkungan Propinsi Sumatra Utara*, (2002), Kerjasama Bapedalda Propinsi Sumatra Utara dengan Lembaga Penelitian Universitas Sumatra Utara (USU), Medan.
- Burn H. Weston, (1993), *Hak Asasi Manusia dalam T. Mulya Lubis (ed), Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia: Isu dan Tindakan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Djoko Marsono, (2003), *Pertambangan di Hutan Lindung*, Kedaulatan Rakyat Edisi Rabu 10 September 2003.
- Kompas Edisi, 13 Juli 2003.
- Media Indonesia Edisi 15 Maret 2003.
- <http://www/jikalahari.com>, diakses tanggal 2 Januari 2013.
- <http://www/mongabay.co.id>, diakses pada 21 Juli 2013.
- <http://www.new.menlh.go.id>, diakses Kamis, 11 Juli 2013.
- <http://www/proper.menlh.go.id>, diakses tanggal 1 Januari 2013.
- <http://www/tempo.com>, diakses 26 Juni 2013